

LAPORAN PENELITIAN
PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PEMERINTAH
DAERAH PROPINSI BANTEN



Oleh:

Rakhmini Juwita, SE,M.Si (Ketua)

Rini Dwiyani Hadiwidjadja,SE, M.Si (anggota)

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014

**LEMBAR PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN MADYA BIDANG ILMU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA**

1. a. Judul Penelitian : Pengaruh Anggaran Kinerja dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Governance* pada Pemerintah Daerah Propinsi Banten
b. Bidang Penelitian : Akuntansi
c. Klasifikasi Penelitian : Akuntansi Sektor Publik
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap & Gelar : Rakhmini Juwita, SE, M.Si
b. NIP : 19820523 200812 2 007
c. Golongan Kepangkatan : III a
d. Jabatan Akademik Fakultas dan Unit Kerja : Dosen Ekonomi UPBJJ UT Serang
e. Program Studi : Akuntansi
3. Anggota Peneliti
a. Jumlah Anggota : 1
b. Nama Anggota dan Unit Kerja : Rini Dwiyani Hadiwidjaja dan UT Pusat
c. Program Studi : Akuntansi
4. a. Periode Penelitian : 2014
b. Lama Penelitian : 9 bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000
6. Sumber Biaya : LPPM UT

7. Pemanfaatan Hasil Penelitian : Seminar dan Jurnal Nasional

Mengetahui
Kepala UPBJJ UT Serang

Maman Sudirman, S.Pd, M.Pd
NIP. 19600212 198603 1 002

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Pemerintah merupakan bagian dari organisasi publik yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dana yang ada di pemerintah pun merupakan dana masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah harus bertanggung jawab dalam pengelolaan dana masyarakat sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas pemerintah kepada publik sangat dibutuhkan, karena dengan adanya akuntabilitas publik maka tata kelola pemerintah akan menjadi baik.

Akuntabilitas publik di Indonesia masih sangat lemah karena masih banyak uang negara yang diambil oleh koruptor dan hal tersebut membuat akuntabilitas pemerintah masih rendah. Sama halnya dengan kasus korupsi yang terjadi di Propinsi Banten yang saat ini marak dibicarakan di berbagai media, seperti yang dinyatakan oleh Masyarakat Transparansi Anggaran bahwa 90% Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Banten terlibat korupsi (news.liputan6.com, 5/09/2014)

Hal terpenting dalam mewujudkan akuntabilitas publik diantaranya yaitu dengan adanya perencanaan anggaran dan pengendalian intern. Perencanaan anggaran mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD dengan tujuan penggunaan dana pemerintah dapat tepat sasaran dan tujuan sehingga dana digunakan secara efektif dan efisien.

Pengendalian intern menurut COSO dalam buku Azhar Susanto (2008:95) adalah sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Dengan adanya pengendalian intern di pemerintah diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam organisasi khususnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Pengendalian Intern di pemerintah daerah masih banyak kelemahan diantaranya yaitu hasil pemeriksaan keuangan semester II Tahun 2012 oleh BPK yang menyatakan adanya 1.427 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp11,48 miliar (bpk.go.id. 2/4/2013).

Perencanaan anggaran dan pengendalian intern merupakan kegiatan yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara karena berkaitan dengan akuntabilitas kepada publik. Fenomena tersebut membuktikan bahwa masih banyak pembenahan yang harus dilakukan dalam pemerintah Daerah di Indonesia khususnya di Propinsi Banten. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis terdorong untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Publik di Propinsi Banten”**

I.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Penyusunan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintah Daerah Propinsi Banten.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris untuk mengetahui pengaruh Penyusunan Anggaran dan pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Publik baik secara parsial maupun simultan di Propinsi Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peneliti dalam lingkup akuntansi pemerintahan, khususnya yang berkenaan dengan penyusunan anggaran, pengendalian intern dan akuntabilitas publik pada pemerintah daerah di Propinsi Banten
2. Bagi Praktisi khususnya Pemeritah Daerah Kabupaten/kota di Propinsi Banten, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengendalian intern dalam rangka akuntabilitas kepada publik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Penyusunan Anggaran dan pengendalian intern merupakan bagian dari Akuntabilitas Publik. Untuk mendapatkan gambaran teoritis mengenai Penyusunan anggaran, pengendalian intern dan akuntabilitas public maka akan penulis menguraikan teori yang menjadi landasan dan dapat mendukung penelitian ini.

2.1.1 Perencanaan Anggaran

Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. (Indra bastian, 2010:165)

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Indra Bastian, 2010:192). Pengertian anggaran menurut *the National Committee on Governmental Accounting* (NCGA)

“A Budget is a plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and proposed means financing them”

Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan

uang publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun (Mardiasmo, 2009:61).

Menurut Lee Robert,D.Jr.,et al (2004:1) pengertian anggaran adalah sebagai berikut:

Budgeting is intended as a mechanism for setting goals and objectives, for measuring progress toward objectives, for identifying weakness or inadequacies in organizations, and for controlling and integrating the diverse activities carried out by numerous sub unit within large bureaucracies both public and private. Budgeting is a manifestation of an organizations strategies, whether those strategies are the result of thoughtful strategic planning processes of the inertia of long years of doing approximately the same thing, or of the competing political forces within the organization bargaining for shares of resources.

Menurut Indra Bastian (2010:191) anggaran publik berfungsi sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja

- b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang
- c. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan
- d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
- e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi
- f. Anggaran merupakan instrument politik
- g. Anggaran merupakan kebijakan fiskal

Indra Bastian (2010:192) juga menyatakan bahwa kebutuhan anggaran diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. Anggaran sebagai alat perencanaan
anggaran digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (public welfare), dengan jalan memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan (annual budget)
- 2. Anggaran sebagai alat pengendalian\
Anggaran digunakan sebagai alat pengendalian yang efektif, yang harus dilakukan secara melekat (built in control), dalam tubuh organisasi atas berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.
- 3. Anggaran sebagai alat evaluasi

Kinerja setiap pelaksanaan kegiatan dapat diukur dan dievaluasi secara periodik maupun insidental, yaitu:

- (1) Apakah sudah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran
- (2) Apakah tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan
- (3) Apakah sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan pembandingan yang sejenis

Proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

- (1) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah
- (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara
- (3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
- (4) Penyusunan rancangan perda APBD
- (5) Penetapan APBD

Berdasarkan PP Nomor.58 Tahun 2005 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

- Berdasarkan pedoman penyusunan RKA, kepala SKPD menyusun RKASKPD.
- RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan KPJM, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan KPJM dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk

program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

- Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA.
- Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- Penyusunan anggaran dan prestasi kerja dimaksud dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- Standar satuan harga ditetapkan oleh kepala daerah.
- Penyusunan RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
 - RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
 - RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

2.1.2 Pengendalian Intern

Pengendalian intern menurut COSO yang dikutip dari executive summary *internal control - integrating framework 2013* Committee Of Sponsoring Organization (COSO)

Internal control is a process. Effected by an entity's board of director, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance.

Pengendalian internal adalah suatu proses. Dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan.

Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dinyatakan bahwa :

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan

berikut ini : (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Menurut Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9), mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai berikut :

“Semua tindakan yang dilakukan oleh manajemen, direksi, komisaris, ataupun pihak lain untuk mengelola resiko dan meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Manajemen merencanakan, mengorganisir dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk meningkatkan kepastian bahwa tujuan akan tercapai. Sistem pengendalian internal terdiri atas lingkungan pengendalian, assesment resiko, kegiatan (prosedur) pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian”.

Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas (Arens et all, 2008:370)

Sistem pengendalian internal pemerintahan di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berikut ini adalah definisi mengenai sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 :

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Arens (2008:370) tujuan system pengendalian intern yang efektif yaitu:

- a. Reliabilitas pelaporan keuangan. Manajemen memiliki tanggung jawab secara hukum dan professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan.
- b. Efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

- c. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Semua perusahaan publik harus mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas laporan keuangan dan diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan.

SPIP memang mengadaptasi dari konsep pengendalian intern COSO. Dalam *executive summary internal control - integrating framework 2013* mendefinisikan bahwa pengendalian internal terdiri atas lima komponen yang terintegrasi, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 juga menjelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Sebuah prasyarat untuk penilaian risiko adalah penetapan tujuan, terkait pada tingkat yang berbeda dari entitas. Manajemen menentukan tujuan dalam kategori yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan kejelasan yang cukup untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisa risiko untuk tujuan tersebut. Manajemen juga mempertimbangkan kesesuaian tujuan untuk entitas. Penilaian risiko juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam model bisnis sendiri yang dapat membuat pengendalian internal tidak efektif.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan bahwa manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan di semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian tersebut sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut

- b. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah,

- c. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko,
- d. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- e. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- f. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- g. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 2) Pembinaan sumber daya manusia;
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- 4) Pengendalian fisik atas aset;
- 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- 6) Pemisahan fungsi;
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- 11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuannya. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Komunikasi adalah terus-menerus, berulang proses penyediaan, berbagi, dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Komunikasi internal adalah cara dimana informasi disebarkan keseluruh organisasi, mengalir ke atas, bawah, dan di seluruh entitas. Hal ini memungkinkan personil untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen senior bahwa tanggung jawab kontrol harus dianggap serius.

5. Aktivitas Monitoring/pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, termasuk kontrol

untuk mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, hadir dan berfungsi. Evaluasi berkelanjutan, dibangun ke dalam proses bisnis di berbagai tingkat entitas, memberikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah, dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh regulator, diakui penetapan standar badan atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi yang sesuai.

2.1.3 Akuntabilitas Publik

Menurut Muindro (2012:14) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Tuntutan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horisontal, tidak hanya akuntabilitas vertikal.

American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Menurut Kelly dan Rivenbark (2003 : 3) setidaknya terdapat 3 (tiga) dimensi akuntabilitas publik yang terkait dengan penerapan anggaran kinerja ini yaitu akuntabilitas politik (*political accountability*), akuntabilitas operasional (*operational accountability*) dan akuntabilitas keuangan (*financial accountability*). Akuntabilitas politik berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan respon terbaik terhadap kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Salah satu bentuk dari kebijakan publik tersebut adalah menentukan pelayanan publik (*public services*) mana yang diprioritaskan untuk ditingkatkan kualitasnya, hingga memutuskan sumberdaya yang harus disediakan untuk keperluan tersebut. Hal tersebut dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang pada saatnya akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun anggaran pemerintah.

Akuntabilitas operasional berkaitan dengan aspek keekonomian, keefisienan dan keefektifan dari penyediaan pelayanan publik yang direfleksikan dengan menggunakan ukuran kinerja masukan, keluaran dan hasil dalam anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja.

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan kemampuan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tentang bagaimana sumberdaya keuangan diperoleh dan digunakan. Akuntabilitas keuangan ini lebih dari sekedar pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan, dimana pengendalian keuangan (*financial control*) harusnya dapat mencapai maksud tersebut. Akuntabilitas keuangan mempunyai tujuan yang lebih besar lagi untuk secara tepat menyajikan darimana sumberdaya keuangan diperoleh dan untuk apa digunakan termasuk hasil yang didapatkan dari setiap penggunaan sumberdaya keuangan tersebut. Dan penggunaan ukuran kinerja masukan, keluaran dan hasil akan dapat menunjukkan keterhubungan dari sumberdaya keuangan yang diperoleh dan digunakan dengan hasil yang didapatkan.

Yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor publik (elwood dalam muindro 2012:41)

a) *Accountability for probity and legality*, akuntabilitas kejujuran dan hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan.

- b) *Process Accountability*, akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk dapat menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c) *Program accountability*, akuntabilitas program, untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal
- d) *Policy accountability*, akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance* sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan *good governance*. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002:20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Tuntutan akuntabilitas publik terkait dengan

perlunya transparansi dan pemberian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui oleh para legislator (Indra Bastian, 2010:192). Sehingga jelas bahwa perencanaan anggaran organisasi/pemerintah yang baik akan meningkatkan akuntabilitas organisasi/pemerintah.

2.2.2 Hubungan Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Publik

Menurut Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

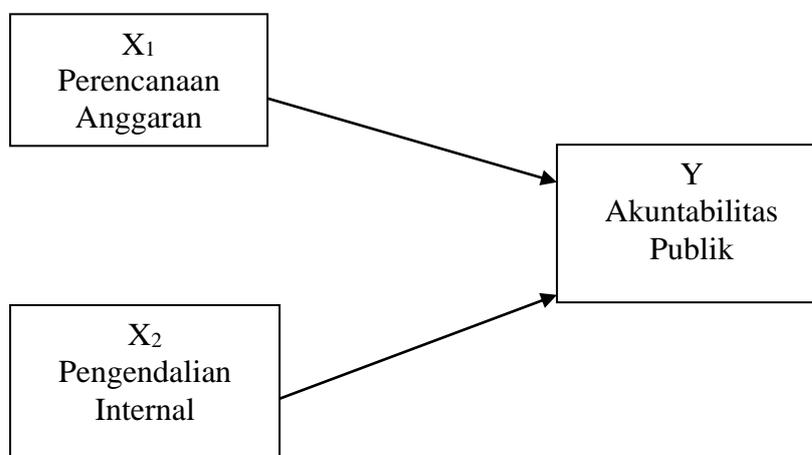
Menurut Arens et all, (2008:370) Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas. Sehingga jelas bahwa dengan adanya pengendalian intern dalam suatu organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi tersebut.

2.3 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dua variabel bebas adalah Perencanaan Anggaran (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) sedangkan variabel terikatnya yaitu Akuntabilitas Publik (Y). Sehingga berdasarkan kerangka pemikiran didapatkan gambar model dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian



2.4 HIPOTESIS

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Semakin baik perencanaan anggaran maka akan semakin baik akuntabilitas publik
2. Semakin baik pengendalian internal maka akan semakin baik akuntabilitas publik
3. Semakin baik perencanaan anggaran dan pengendalian internal secara simultan maka akan semakin baik akuntabilitas publik

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek dalam penelitian ini adalah Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Publik.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul selama proses penelitian, hal ini penting karena desain penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian dan sebagai alat untuk mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian (Sugiyono, 2010). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan eksplanatory. Kotler et al. (2006), menyatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya memaparkan (mendeskripsikan) sesuatu fenomena, Penelitian kausal menurut Kotler, (2006) adalah penelitian yang bertujuan menguji (mengetes) hipotesis tentang hubungan sebab dan akibat.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Mengoperasionalkan, atau secara operasional mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur, dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, aspek, sifat yang ditunjukkan oleh konsep (Sekaran, 2006:4). Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu Perencanaan Anggaran, pengendalian intern dan Akuntabilitas Publik. Dalam penelitian ini Perencanaan Anggaran dan Pengendalian intern merupakan variabel independen sedangkan Akuntabilitas Publik merupakan variabel dependen. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka operasional variabel penelitian perlu ini didefinisikan terlebih dahulu sebagai dasar penyusunan kuisioner. Definisi masing-masing variabel sebagai berikut:

1) Variabel *Independen* (X)

Menurut Sugiyono (2008:59), Variabel ini sering disebut variabel bebas, adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat) . Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel independen adalah

- a. Perencanaan Anggaran (X_1). Untuk mengukur variabel perencanaan anggaran, maka dalam penelitian ini menggunakan aspek penyusunan rencana kerja anggaran SKPD menurut PP Nomor 58 tahun 2005
- b. Pengendalian Intern (X_2). Untuk mengukur variable Pengendalian Intern menggunakan teori COSO dan PP Nomor 60 tahun 2008 yaitu: (a) lingkungan pengendalian, (b) Penaksiran resiko, (c) Aktifitas Pengendalian (d) Informasi dan komunikasi (e) Pemantauan

2) Variabel Dependen (Y)

Sering disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008: 59). Dalam kaitannya dengan masalah ini maka yang menjadi variabel dependennya yaitu Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik. Untuk mengukur variable akuntabilitas publik, maka menggunakan teori dari elwood yang terdapat dalam Muindro (2012:41) yang menyatakan bahwa akuntabilits public terdiri atas: (a) Akuntabilitas kejujuran dan hokum, (b) Akuntabilitas proses, (c) Akuntabilitas Program, (d) Akuntabilitas Kebijakan

Tabel 3.1

Operasionalisasi variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No Kuesioner
Perencanaan Anggaran (PP Nomor 58 Tahun 2005)	Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan anggaran dengan pendekatan KPJM • Penyusunan anggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu • Penyusunan anggaran dengan pendekatan dengan pendekatan prestasi kerja • Standar satuan harga ditetapkan oleh kepala daerah. • Penyusunan RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, • RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD; 	Ordinal	1 2 3-4 5 6 7
Pengendalian Intern	a. Lingkungan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • penegakan integritas dan Pilai etika 	Ordinal	1

<p>(X2) Sumber: COSO Internal Control Integrated Framework 2013 dan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p>	<p>b. Penaksiran Resiko</p> <p>c. Aktifitas Pengendalian</p> <p>d. Informasi dan Komunikasi</p> <p>e. Pemantauan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • komitmen terhadap kompetensi • kepemimpinan yg kondusif • pembentukan struktur organisasi yg sesuai dengan kebutuhan • pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yg tepat • Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; • Pimpinan melakukan analisis dan identifikasi resiko tujuan organisasi • Review atas kinerja instansi pemerintah • Pembinaan sumber daya manusia • menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; • mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus • Adanya pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit & review lainnya 		<p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7-8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13-14</p>
<p>Akuntabilitas Publik (elwood dalam muindro 2012:41)</p>	<p>a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum</p> <p>b. Akuntabilitas proses</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran penyalahgunaan jabatan • kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan • Pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. • Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap proses 	<p>Ordinal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>

	c. Akuntabilitas Program	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, • ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal 		6
	d. Akuntabilitas kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggung jawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 		7

Sumber: Peneliti (2014)

Dalam mengukur dimensi variabel yang didefinisikan secara operasional tersebut diperlukan adanya penentuan skala dalam penentuan nomor atau simbol untuk memperoleh jawaban dari responden. Adapun skala yang digunakan dalam operasionalisasi variabel ini menggunakan skala ordinal, dengan alasan dalam indikator variabel tersebut memiliki jawaban tingkatan prioritas yang berbeda dari setiap responden. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal dengan menggunakan skala peringkat yaitu skala *likert*. Skala likert menurut Sugiyono (2011:93) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:389) populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di Propinsi Banten. Teknik penarikan sampling yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *nonprobability sampling*. Berdasarkan himbauan dari Sekretaris

daerah provinsi Banten, sampel penelitian tidak disarankan untuk mengambil seluruh instansi pemerintahan yang ada di propinsi Banten dan hanya enam (6) instansi pemerintah yang dapat diteliti, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Instansi Pemerintah Propinsi Banten

NO	INSTANSI
1	Sekretariat Daerah
2	Badan Kesatuan bangsa dan Politik
3	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Badan Perencana Pembangunan Daerah

Sumber: Data diolah (2014)

3.5 Sumber dan Teknik pengumpulan Data

Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2010:197). Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada pimpinan dan staf di setiap bagian dalam instansi, dan setiap instansi terdiri dari lima responden.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode distribusi langsung (*direct distribution method*), yaitu mendatangi para responden secara langsung untuk menyerahkan ataupun mengumpulkan kembali kuesioner. Desain kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*.

3.6 Uji Kualitas Data

Unit analisis merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian sebab melaluinya seluruh informasi utama akan diperoleh. Oleh karena itu yang harus dipertimbangkan adalah masalah relevan atau setidaknya masalah yang diteliti dengan unit analisis yang didefinisikan peneliti.

3.6.1 Uji Validitas

Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2008:172). Menurut Imam Ghazali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur (Arikunto, 2010), sedangkan Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Tujuan uji validitas adalah mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut. Untuk menguji validitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2011:47)

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kekonsistenan pernyataan yang berhubungan dengan tindakan supervisi dapat dipercaya atau diandalkan, salah satu teknik yang dapat digunakan adalah *Cronbach Coefficient Alpha* yaitu suatu formula untuk mengetahui konsistensi reliabilitas internal ketika suatu skala pengukuran terdiri dari beberapa item. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut sudah reliabel, yang artinya konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Reliabilitas adalah konsistensi skor tes atau kemampuan skor tes untuk di-reproduksi. Untuk itu digunakan metode internal konsistensi dengan tehnik *Alpha Cronbach* yang mengukur konsistensi dan homogenitas item yaitu interkorelasi antar item-item dalam suatu alat ukur yang sama.

Koefisien *Alpha* dapat digunakan sebagai indeks dari internal konsistensi, yaitu karakteristik yang dimiliki oleh tes karena interkorelasi positif dari item-item tes tersebut. Reliabilitas berkaitan dengan keterandalan dan konsistensi suatu indikator. Maksudnya, informasi yang ditunjukkan oleh indikator ini tidak berubah-ubah karena karakter indikator itu sendiri atau dengan kata lain konsistensi indikator itu sendiri. Dengan kata lain, bila pengamatan dilakukan dengan perangkat ukur yang sama lebih dari satu kali hasil pengamatan itu sama.

Bila tidak sama dikatakan perangkat ukur itu tidak reliabel. Semakin tinggi koefisien *Alpha* berarti tes tersebut semakin konsisten dan homogen dalam mengukur apa yang hendak diukur.

Suatu konstruk atau variable dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.070 (Nunnaly, 1994 dalam Imam Ghozali, 2011:48).

3.7 Analisis Data

Data yang didapatkan dari survei lapangan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif dan analisis data statistic dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 20.0 untuk mempercepat perhitungan.

3.7.1 Analisis data Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2011). Analisis data paling mudah dideskripsikan dengan distribusi frekuensi atau data presentase. Dalam penelitian ini metode pengolahan data dengan pengukuran Quartil. Menurut Lind, et al (2010) kuartil merupakan sebuah perangkat pengamatan yang membagi menjadi empat bagian yang sama. Untuk lebih jelasnya perangkat nilai diatur dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median merupakan sebagai suatu alat ukur lokasi dalam kuartil karena meupaka titik pusat data. Dengan cara yang sama, kuartil membagi seperangkat pengamatan empat bagian yang sama. Kuartil pertama,

biasanya diberi label Q_1 , adalah nilai 25 persen dari nilai terendah pengamatan, dan kuartil ketiga, biasanya diberi label Q_3 , adalah nilai 75 persen dari nilai terendah pengamatan. Logikanya, Q_2 adalah median. Q_1 dapat dikatakan sebagai "median" dari data nilai terendah dan Q_3 sebagai "median" dari nilai tertinggi.

Sehingga penilaian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Minimal	<	skor total	<	Kuartil I	:	Buruk
Kuartil I	<	skor total	<	Median	:	Kurang
Median	<	skor total	<	Kuartil II	:	Cukup
Kuartil II	<	skor total	<	Maksimal	:	Baik

Keterangan:

Maksimal : Total nilai maksimal

Minimal : Total nilai minimal

Median : $(\text{Maksimal} + \text{Minimal}) : 2$

Kuartil I : $(\text{Minimal} + \text{Median}) : 2$

Kuartil III : $(\text{Maksimal} + \text{Median}) : 2$

3.7.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011:160)

3.7.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Imam Ghozali, 2011:105).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (terikat).
- b. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen (bebas). Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen bukan berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen
- c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) VIF (Variance Inflation Factor). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabelindependen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independenlainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3.7.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2011:105)

3.7.5 Analisis data dengan *Regresi linear berganda*

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda Menurut Jonathan Sarwono (2006:79) pengertian regresi linear berganda adalah : Regresi linier berganda mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung

Regresi liner berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara peubah respon (variabel *dependent*) dengan faktor-faktor yang menjelaskan yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor (variabel *independent*). Tujuan

analisis regresi linier berganda adalah untuk memuat prediksi/perkiraan nilai Y atas X. Bentuk persamaan linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k$$

dengan :

Y : pengamatan ke-i pada variabel tak bebas

X_{ki} : pengamatan ke-i pada variabel bebas

β_0 : parameter intercept

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$: parameter koefisien regresi variabel tak bebas

3.8 Perancangan Hipotesis

Umi Narimawati (2010:7) mengemukakan Hipotesis yaitu "Asumsi atau dugaan sementara yang harus di uji kebenarannya dalam suatu analisis statistik." Rancangan pengujian hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah mengenai ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti, dimana nol (H_0) merupakan hipotesis tentang adanya pengaruh, yang pada umumnya dirumuskan untuk ditolak sedangkan hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis penelitian. Sehingga penelitian ini sebagai alat untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) yaitu Perencanaan Anggaran (X_1) dan Pengendalian Intern (X_2) terhadap Akuntabilitas Publik sebagai variabel dependen (Y), hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F).

Uji F ini digunakan secara simultan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai r^2 telah diketahui selanjutnya akan diuji apakah nilai koefisien determinasi mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan hipotesis secara keseluruhan antara variabel perencanaan anggaran dan pengendalian internal terhadap variabel terikat akuntabilitas publik

$H_0 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik

$H_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan rasio lancar dan pendapatan perlembar saham terhadap variabel terikat dividen kas.

Menentukan nilai signifikansi α yaitu 5% atau 0,05 dan derajat bebas ($dk = k ; n - k - 1$), untuk mengetahui daerah F_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan.

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t).

Untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel – variable bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik t dengan langkah – langkah sebagai berikut:

- a) Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Perencanaan anggaran terhadap variable terikat akuntabilitas publik. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :

$H_0 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik

$H_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik.

b) Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Pengendalian Intern terhadap variabel terikat akuntabilitas publik. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :

$H_0 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas publik

$H_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas publik

. Untuk melihat kuat lemahnya pengaruh atau tinggi rendahnya keeratan hubungan antar variabel, digunakan klasifikasi Guilford sebagai berikut :

Less than 0,20 : slight almost negligible relationship

0,20 – 0,40 : *Low correlation*

0,40 – 0,70 : *Moderate correlation*

0,70 – 0,90 : *High correlation*

0,90 – 1,00 : *Very high correlation*

3.9 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik, pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik, serta pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian

intern terhadap akuntabilitas publik. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan regresi berganda

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka peneliti menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya, yaitu hipotesis nol (H_0) yang diformulasikan untuk ditolak, dan hipotesis alternative (H_1) yaitu hipotesis yang diformulasikan untuk diterima dengan perumusan sebagai berikut.

(1) $H_0 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik

$H_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik.

(2) $H_0 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas publik

$H_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas publik

(3) $H_0 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas publik

$H_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas public

Kriteria dari pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut :

Apabila thitung positif (+), maka :

- $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak
- $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima

Apabila t_{hitung} negatif (-), maka :

- $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima
- $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik di lingkungan Propinsi Banten. Bagian pertama yang akan diuraikan adalah hasil pengujian alat ukur penelitian. Bagian kedua adalah mendeskripsikan data hasil penelitian yaitu berupa tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, yang menggambarkan indikator dari variabel penelitian yang terdiri perencanaan anggaran, pengendalian intern dan akuntabilitas publik. Pada bagian terakhir akan diuraikan pembahasan hasil penelitian dari pengujian hipotesis sehingga dapat diperoleh gambaran dan kesimpulan akhir mengenai hasil penelitian ini.

4.1.1 Hasil Uji Instrumen Penelitian

4.1.1.1 Uji Validitas

Uji validitas instrument penelitian dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS versi 20. Berikut hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS 20.

Tabel 4.1
Tabel Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
1	Perencanaan Anggaran (X_1)	1	0.421	0.1793	Valid
		2	0.386	0.1793	Valid
		3	0.621	0.1793	Valid
		4	0.378	0.1793	Valid
		5	0.458	0.1793	Valid
		6	0.539	0.1793	Valid
		7	0.422	0.1793	Valid
2	Pengendalian Intern (X_2)	1	0.264	0.1793	Valid
		2	0.563	0.1793	Valid
		3	0.695	0.1793	Valid
		4	0.594	0.1793	Valid
		5	0.490	0.1793	Valid

		6	0.552	0.1793	Valid
		7	0.374	0.1793	Valid
		8	0.522	0.1793	Valid
		9	0.524	0.1793	Valid
		10	0.424	0.1793	Valid
		11	0.521	0.1793	Valid
		12	0.297	0.1793	Valid
		13	0.385	0.1793	Valid
		14	0.513	0.1793	Valid
3	Akuntabilitas Publik	1	0.454	0.1793	Valid
		2	0.390	0.1793	Valid
		3	0.409	0.1793	Valid
		4	0.413	0.1793	Valid
		5	0.378	0.1793	Valid
		6	0.486	0.1793	Valid
		7	0.284	0.1793	Valid

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diatas maka diperoleh hasil uji validitas dari setiap item pernyataan dalam kuesioner adalah valid, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai *Corrected Item-Total Correlation* (r_{hitung}) lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0.1793. Sehingga dengan demikian semua pernyataan dalam kuesioner untuk seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu perencanaan anggaran (X_1), pengendalian internal (X_2) dan pengendalian internal (Y) dinyatakan layak digunakan dan dapat diolah sebagai data penelitian.

4.1.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kekonsistenan pernyataan yang berhubungan dengan tindakan supervisi dapat dipercaya atau diandalkan, salah satu teknik yang dapat digunakan adalah *Cronbach Coefficient Alpha* yaitu suatu formula untuk mengetahui konsistensi reliabilitas internal ketika suatu skala pengukuran terdiri dari beberapa item. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut sudah reliabel, yang artinya konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur.

Hasil pengujian reliabilitas semua variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Tabel Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
1	Perencanaan anggaran	0.744	Reliabel
2	Pengendalian internal	0.838	Reliabel
3	Akuntabilitas public	0.723	Reliabel

Sumber: Data Olahan (2014)

Hasil perhitungan nilai reliabilitas pada tabel di atas memperlihatkan bahwa untuk variabel Perencanaan anggaran (X₁) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,744, untuk variabel pengendalian internal (X₂) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,838 dan untuk variabel akuntabilitas publik (Y) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,723.

Terlihat bahwa masing masing variabel memiliki nilai koefisien reliabilitas > 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item dari setiap variabel dan X₁, X₂ dan Y adalah reliabel dan dapat diuji lebih lanjut

4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Perencanaan Anggaran

Pada sub bab ini menjelaskan mengenai hasil survey yang disertai analisis kualitatif untuk variabel implementasi perencanaan anggaran (X₁). Untuk jawaban/ tanggapan setiap pernyataan setiap pertanyaan dalam kuesioner disajikan dalam bentuk tabel

Tabel 4.3
Perencanaan Anggaran

No	Pernyataan	Jawaban				Total	Skor
		1	2	3	4		
1	Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya	1	2	60	57	120	413
2	Penyusunan anggaran dilakukan dengan	0	2	56	62	120	418

	mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA						
3	Penyusunan Anggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil	1	2	65	52	120	408
4	Penyusunan Anggaran dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dalam pencapaian hasil kegiatan dan program	2	3	74	41	120	394
5	Standar satuan harga dalam anggaran ditetapkan oleh kepala daerah	2	2	65	51	120	405
6	Penyusunan Anggaran memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan	0	0	55	65	120	425
7	Anggaran memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD	0	0	42	78	120	438
	TOTAL	6	11	417	406	840	2901
	Jumlah dalam persentase (%)	0.7	1.3	49.7	48.3	100	

Sumber: Data diolah (2014)

Jawaban yang diberikan responden selanjutnya dijelaskan dengan membagi skor tanggapan ke dalam pengelompokan distribusi rentang. Pada penelitian ini, penulis membagi ke dalam empat rentang kuartil. Perencanaan anggaran diukur dengan 7 pertanyaan dalam kuesioner. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari 120 responden yang menjadi sumber data penelitian untuk 7 item sebagai ukuran perencanaan anggaran (X_1), nilai kuartil I, Kuartil II dan 'kuartil III dapat ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut:

- Skor minimum = $1 \times 7 \times 120 = 840$
- Skor maksimum = $4 \times 7 \times 120 = 3360$
- Kuartil II (Median) = $[840 + 3360] : 2 = 2100$
- Kuartil I = $[840 + 2100] : 2 = 1470$
- Kuartil III = $[2100 + 3360] : 2 = 2730$

Selanjutnya skor penilaian terhadap variabel diklasifikasikan berdasarkan:

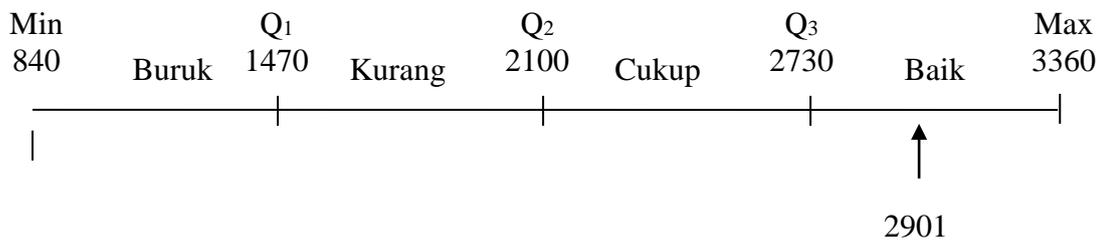
- Baik : $\text{Kuartil III} < X < \text{Skor Maksimal}$

- Cukup : Median < X < Kuartil III
- Kurang : Kuartil I < X < Median
- Buruk : Skor Minimal < X < Kuartil I

Dari skor item diperoleh total skor sebesar 2901. Berdasarkan nilai kuartil I, kuartil II dan kuartil III yang diperoleh, tanggapan responden diklasifikasikan pada rentang skor sebagai berikut:

Gambar 4.1

Interval skor total Perencanaan Anggaran



Terlihat secara keseluruhan perencanaan anggaran (X_1) berada dalam kategori baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil tanggapan responden pada item pernyataan perencanaan anggaran terlihat sebagian besar memberikan penilaian pada skor 3 (49.7%) dan 4 (48.3%).

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Pengendalian Intern

Tabel 4.4
Pengendalian Intern

No	Pernyataan	Jawaban				Total	Skor
		1	2	3	4		
1	Pimpinan memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku	1	1	62	56	120	413
2	Pimpinan mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD	1	2	55	62	120	418
3	Pimpinan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan	1	2	81	36	120	392
4	Pimpinan memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi	0	0	59	61	120	421

5	Pimpinan memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat, sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	1	2	62	55	120	411
6	Pimpinan melakukan supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai	0	0	86	34	120	394
7	Pimpinan menentukan metodologi yg sesuai untuk tujuan instansi pemerintah & tujuan pada tingkatan secara komprehensif	1	2	66	51	120	407
8	Pimpinan menggunakan mekanisme yg memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal	0	0	79	41	120	401
9	Pimpinan melakukan reuiu atas kinerja organisasi	0	0	71	49	120	409
10	Pimpinan mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;	0	0	58	62	120	422
11	Pimpinan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi untuk tujuan oranisasi	0	1	60	59	120	416
12	Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus dalam mencapai tujuan organisasi	1	1	48	70	120	427
13	Adanya pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah dalam pelaksanaan tugas	0	0	81	39	120	399
14	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya	0	0	80	40	120	400
	Total	6	11	948	715	1680	5730
	Jumlah dalam persentase	0.4	0.6	56.4	42.6	100	

Sumber: Data Diolah (2014)

Pengendalian intern diukur dengan 14 pertanyaan dalam kuesioner.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari 120 responden yang menjadi sumber data penelitian untuk 14 item sebagai ukuran pengendalian intern (X_2), nilai kuartil I, Kuartil II dan 'kuartil III dapat ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut:

- Skor minimum = $1 \times 14 \times 120 = 1680$
- Skor maksimum = $4 \times 14 \times 120 = 6720$
- Kuartil II (Median) = $[1680 + 6720] : 2 = 4200$
- Kuartil I = $[1680 + 4200] : 2 = 2940$
- Kuartil III = $[4200 + 6720] : 2 = 5460$

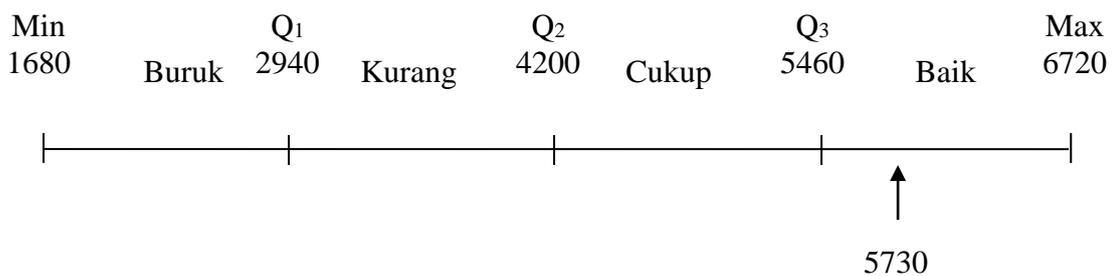
Selanjutnya skor penilaian terhadap variabel diklasifikasikan berdasarkan:

- Baik : Kuartil III < X < Skor Maksimal

- Cukup : Median < X < Kuartil III
- Kurang : Kuartil I < X < Median
- Buruk : Skor Minimal < X < Kuartil I

Dari skor item diperoleh total skor sebesar 5730. Berdasarkan nilai kuartil I, kuartil II dan kuartil III yang diperoleh, tanggapan responden diklasifikasikan pada rentang skor sebagai berikut:

Gambar 4.2
Interval skor total Pengendalian Intern



Terlihat secara keseluruhan pengendalian intern (X_2) berada dalam kategori baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil tanggapan responden pada item pernyataan perencanaan anggaran terlihat sebagian besar memberikan penilaian pada skor 3 (56.4%) dan 4 (42.6%).

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Akuntabilitas Publik

Tabel 4.5
Akuntabilitas Publik

No	Pernyataan	Jawaban				Total	Skor
		1	2	3	4		
1	Melakukan penghindaran penyalahgunaan jabatan	0	0	48	72	120	432
2	Memiliki kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan	0	0	45	75	120	435
3	Pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya.	0	1	61	58	120	417
4	Adanya Pengawasan dan pemeriksaan proses organisasi	1	1	60	58	120	415
5	Tujuan yang ditetapkan dapat tercapai,	0	0	58	62	120	422
6	Ada alternatif program lain yang memberikan	1	2	58	60	120	359

	hasil maksimal dengan biaya minimal						
7	Memiliki Pertanggung jawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.	0	0	50	70	120	430
	Total	2	4	380	455	840	2910
	Jumlah Persentase	0.2	0.5	45.2	54.1	100	

Sumber: Data Diolah (2014)

Akuntabilitas publik diukur dengan 7 pertanyaan dalam kuesioner. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari 120 responden yang menjadi sumber data penelitian untuk 7 item sebagai ukuran akuntabilitas publik (Y), nilai kuartil I, Kuartil II dan 'kuartil III dapat ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut:

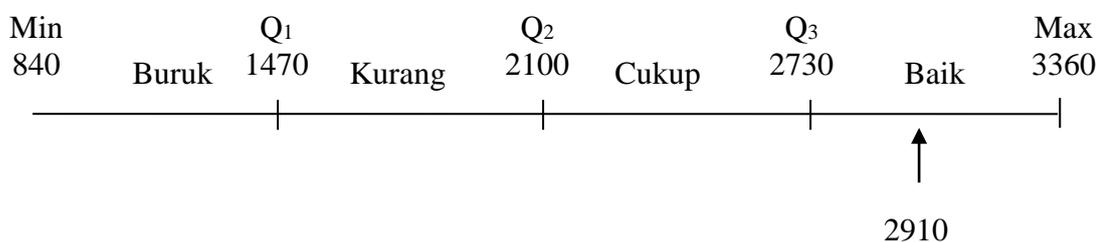
- Skor minimum = $1 \times 7 \times 120 = 840$
- Skor maksimum = $4 \times 7 \times 120 = 3360$
- Kuartil II (Median) = $[840 + 3360] : 2 = 2100$
- Kuartil I = $[840 + 2100] : 2 = 1470$
- Kuartil III = $[2100 + 3360] : 2 = 2730$

Selanjutnya skor penilaian terhadap variabel diklasifikasikan berdasarkan:

- Baik : $\text{Kuartil III} < X < \text{Skor Maksimal}$
- Cukup : $\text{Median} < X < \text{Kuartil III}$
- Kurang : $\text{Kuartil I} < X < \text{Median}$
- Buruk : $\text{Skor Minimal} < X < \text{Kuartil I}$

Dari skor item diperoleh total skor sebesar 2910. Berdasarkan nilai kuartil I, kuartil II dan kuartil III yang diperoleh, tanggapan responden diklasifikasikan pada rentang skor sebagai berikut:

Gambar 4.3
Interval skor total Akuntabilitas Publik



|

Terlihat secara keseluruhan akuntabilitas publik (Y) berada dalam kategori baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil tanggapan responden pada item pernyataan perencanaan anggaran terlihat sebagian besar memberikan penilaian pada skor 3 (45.2%) dan 4 (54.1%).

4.1.3 Analisa Data Statistik

4.1.3.1 Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi linear dapat dikatakan baik untuk menggambarkan hubungan fungsional sekelompok variabel bebas terhadap variabel tak bebas jika persamaan tersebut memenuhi asumsi-asumsi regresi klasik. Beberapa asumsi dalam pembentukan persamaan regresi menggunakan metoda penaksiran *Ordinary Least Squares* (OLS) perlu diuji sebelum menggunakan persamaan yang diperoleh. Asumsi regresi yang dilihat adalah asumsi error hasil penaksiran model mengikuti distribusi normal, asumsi bebas kolinearitas dan asumsi tidak terdapat heterokedastisitas.

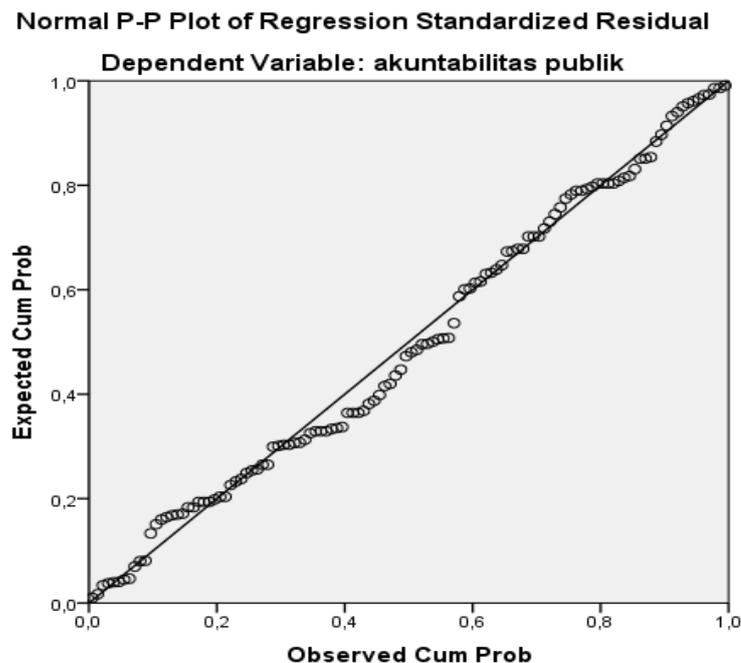
Persamaan regresi linier yang diperoleh melalui metode penaksiran OLS (*Ordinary Least Squares*) dapat dikatakan baik untuk menggambarkan hubungan fungsional sekelompok variabel bebas terhadap variabel tak bebas jika persamaan tersebut memenuhi asumsi-asumsi regresi klasik. Beberapa asumsi dalam pembentukan persamaan regresi perlu diuji sebelum menggunakan persamaan yang diperoleh. Asumsi regresi yang dilihat dalam persamaan regresi pada

penelitian ini adalah asumsi error hasil penaksiran model mengikuti distribusi normal, asumsi bebas kolinearitas dan asumsi tidak terdapat heterokedastisitas.

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan uji analisis grafik dan analisis statistic. Analisis grafik didapatkan grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang digambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik normal probability plot maka didapatkan gambar sebagai berikut:

Gambar 4.4



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa distribusi data bersifat normal karena penyebaran data membentuk satu garis lurus diagonal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis uji statistic kolmogorov smirnov maka didapatkan sebagai berikut

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,91816582
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,066
	Negative	-,050
Kolmogorov-Smirnov Z		,726
Asymp. Sig. (2-tailed)		,667

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber Data Olahan (2014)

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa distribusi data bersifat normal karena nilai signifikansi 0.667 lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen) yaitu perencanaan anggaran dan pengendalian internal. Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan terjadi gejala multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable independen. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) VIF (*Variance Inflation Factor*). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variable independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,946	2,720		4,024	,000	
	perencanaan anggaran	,272	,078	,293	3,461	,001	,985
	pengendalian internal	,142	,046	,263	3,110	,002	,985

a. Dependent Variable: akuntabilitas public
Sumber: Data Olahan (2014)

Hasil perhitungan diatas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yaitu perencanaan anggaran dan pengendalian internal. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas.

4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Model

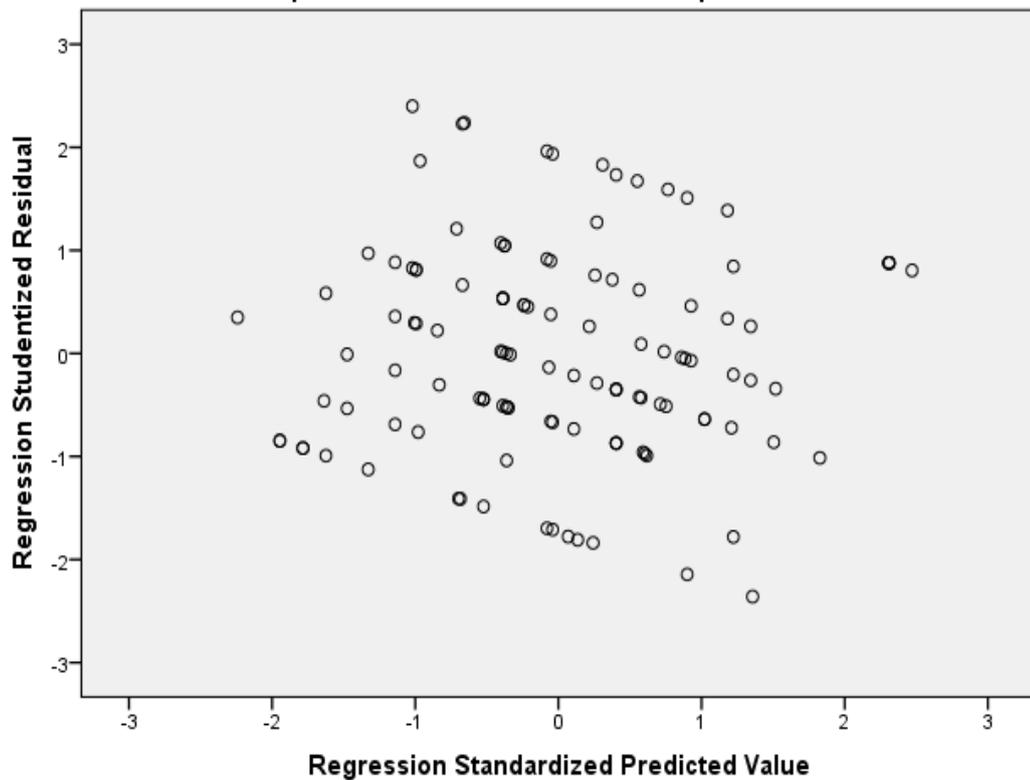
regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu:

1. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di studentized. Hasil uji heterokedastisitas menggunakan grafik plot adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5

Scatterplot

Dependent Variable: akuntabilitas publik



Dari gambar diatas didapatkan hasil bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas apabila plot menyebar merata di atas dan di bawah sumbu 0 tanpa membentuk sebuah pola tertentu. Diagram di atas dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

2. Uji Glejser, mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen. Hasil dari uji heterokedastisitas dengan uji glejser didapatkan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,827	1,567		,527	,599
1 perencanaan anggaran	-,026	,045	-,053	-,575	,566
pengendalian internal	,029	,026	,101	1,088	,279

a. Dependent Variable: RES2
Sumber: Data Olahan (2014)

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode Glesjer nilai signifikansi lebih besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.1.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 20 di peroleh koefisien regresi sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,946	2,720		4,024	,000
1 perencanaan anggaran	,272	,078	,293	3,461	,001
pengendalian internal	,142	,046	,263	3,110	,002

a. Dependent Variable: akuntabilitas public
Sumber Data Diolah (2014)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda yang diperoleh dari hasil analisis dengan menggunakan software SPSS versi 20 yaitu

$$Y = 10.946 + 0,272 X_1 + 0,142 X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan di atas maka dapat dijelaskan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik yang terlihat dari nilai koefisien regresi variabel perencanaan anggaran (X_1) diperoleh sebesar 0.272 dengan tingkat signifikan 0,001 dan koefisien regresi variabel pengendalian internal (X_2) 0.142 dengan tingkat signifikansi 0.002. Jadi dapat dijelaskan bahwa pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik berbanding lurus (berpengaruh secara positif) yang terlihat dari koefisien regresi yang diperoleh positif. Selain pengaruh dari perencanaan anggaran dan pengendalian intern ada faktor-faktor atau variabel-variabel lain juga yang mempengaruhi akuntabilitas publik (Y) yang ditandai oleh simbol epsilon (ε_1). Sehingga hubungan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika variabel perencanaan anggaran meningkat dengan asumsi variabel pengendalian intern tetap, maka akuntabilitas juga akan meningkat

2. Jika variabel pengendalian intern meningkat, dengan asumsi variabel perencanaan anggaran tetap, maka akuntabilitas publik juga akan meningkat.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

4.1.4.1 Pengujian Secara Kelesuruhan (Uji F)

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis secara terpisah, dilakukan terlebih dahulu pengujian uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh independen terhadap variabel independen secara bersama-sama atau secara keseluruhan atau dengan kata lain uji F digunakan untuk melihat keberartian (fit/tidaknya) model regresi yang diperoleh (Gujarati, 2003).

Hasil perhitungan statistik uji F diperoleh dari tabel *Analysis of Varians* (*Anova*) untuk setiap model dengan menggunakan bantuan *software SPSS* sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	92,123	2	46,061	12,308	,000 ^b
	Residual	437,844	117	3,742		
	Total	529,967	119			

a. Dependent Variable: akuntabilitas publik

b. Predictors: (Constant), pengendalian internal , perencanaan anggaran

Sumber: Data Diolah (2014)

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H₀: Tidak ada pengaruh perencanaan anggaran (X₁) dan Pengendalian intern (X₂)

secara bersama-sama terhadap akuntabilitas publik (Y)

H₁: Ada pengaruh perencanaan anggaran (X₁) dan Pengendalian intern (X₂) secara

bersama-sama terhadap akuntabilitas publik (Y)

Keputusan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

H_0 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_1 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dengan $df = 120-2$ maka didapat nilai F_{tabel} sebesar 3.07. Terlihat pada tabel diatas nilai F_{hitung} sebesar 191,972. Sehingga Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($12.308 > 3.07$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan anggaran (X_1) dan Pengendalian intern (X_2) secara bersama-sama terhadap akuntabilitas publik (Y). Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan perencanaan anggararn dan pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Jadi, dengan perencanaan anggaran dan pengendalian intern yang baik akan meningkatkan akuntabilitas publik.

4.1.4.2 Pengujian Hipotesis Secara Terpisah (Uji t)

4.1.4.2.1 Uji t Variabel X_1

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh perencanaan anggaran (X_1) terhadap akuntabilitas publik (Y)

H_1 : Ada pengaruh perencanaan anggaran (X_1) terhadap akuntabilitas publik (Y)

Nilai t_{hitung} didapatkan dengan menggunakan software SPSS versi 20, nilai t_{hitung} dibandingkan dengan tingkat kesalahan/ signifikansi ($\alpha=5\%$) dengan derajat kebebasan ($n-2$). Dengan criteria pengambilan keputusan

- $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

- $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima

Tabel 4.10
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,946	2,720		4,024	,000
1 perencanaan anggaran	,272	,078	,293	3,461	,001
pengendalian internal	,142	,046	,263	3,110	,002

a. Dependent Variable: akuntabilitas public

Sumber: Data Diolah (2014)

Terlihat dari hasil uji parsial table diatas diperoleh t_{hitung} untuk variable perencanaan anggaran (X_1) adalah 3.461. dengan derajat kebebasan $(n-2) = 120-2 = 118$, sehingga didapat t_{tabel} 1.98027, karena besarnya $t_{hitung} > t_{tabel}$ $3.461 > 1.98027$, maka H_0 ditolah dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa X_1 mempengaruhi Y atau dengan kata lain perencanaan anggaran mempengaruhi akuntabilitas publik

4.1.4.2.2 Uji Variable X_2

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan:

H_0 : Tidak ada pengaruh pengendalian intern (X_1) terhadap akuntabilitas publik (Y)

H_1 : Ada pengaruh pengendalian intern (X_2) terhadap akuntabilitas publik (Y)

Terlihat dari hasil uji parsial tabel diatas diperoleh t hitung untuk variable X_1 adalah 3.461. dengan derajat kebebasan $(n-2) = 120-2 = 118$, sehingga didapat t_{tabel} 1.98027, karena besarnya $t_{hitung} > t_{tabel}$ $3.110 > 1.98027$, maka H_0 ditolah dan H_1 diterima. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa X_2 mempengaruhi Y atau dengan kata lain perencanaan anggaran mempengaruhi akuntabilitas publik.

4.2 Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik
- 2 pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik
- 3 pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik

Untuk menjelaskan hasil hipotesis tersebut diatas maka akan dibahas satu persatu sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Publik

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal tersebut berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{table} $3.110 > 1.98027$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran (X_1) maka akan semakin baik pula akuntabilitas publik (Y). Berikut hasil pengolahan data pengaruh perencanaan anggaran (X_1) terhadap akuntabilitas public (Y) dengan menggunakan analisis koefisien determinasi melalui SPSS versi 20

Tabel 4.11
koefisien korelasi dan determinasi Pengaruh X_1 Terhadap Y
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,425 ^a	,181	,198	2,004

a. Predictors: (Constant), perencanaan anggaran

Sumber: Data Diolah (2014)

Dari nilai koefisien korelasi diatas sebesar 0.425 menurut kategory Guilford hubungan perencanaan anggaran dan akuntabilitas public dinilai sedang, pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik sebesar 18.1%. Masih ada 81.9% atau pengaruh variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh X_1 yang tidak diteliti.

Perencanaan anggaran merupakan digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*), dengan jalan memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan (*annual budget*). Perencanaan anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan anggaran publik, anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui oleh para legislator (Indra Bastian, 2010:192).

4.2.2 Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Publik

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal tersebut berdasarkan hasil uji

statistik diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{table} ($3.461 > 1.98027$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian intern (X_2) maka akan semakin baik pula akuntabilitas public (Y). Berikut hasil pengolahan data pengaruh perencanaan anggaran (X_2) terhadap akuntabilitas public (Y) dengan menggunakan analisis koefisien determinasi melalui SPSS versi 20

Tabel 4.12
koefisien korelasi dan determinasi Pengaruh X_2 Terhadap Y
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,418 ^a	,175	,180	2,022

a. Predictors: (Constant), pengendalian internal
 Sumber: Data Diolah (2014)

Dari nilai koefisien korelasi diatas sebesar 0.418 menurut katategori Guilford hubungan perencanaan anggaran dan akuntabilitas public dinilai sedang, pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik sebesar 17.5%. Masih ada 82.5% atau pengaruh variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh X_1 yang tidak diteliti.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Menurut Arens et all, (2008:370) Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas. Sehingga jelas bahwa dengan adanya pengendalian intern dalam suatu organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi tersebut.

4.2.2 Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Publik

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal tersebut berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($12.308 > 3.07$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran dan pengendalian intern (X_2) maka akan semakin baik pula akuntabilitas public (Y). Berikut hasil pengolahan data pengaruh perencanaan anggaran (X_2) terhadap akuntabilitas public (Y) dengan menggunakan analisis koefisien determinasi melalui SPSS versi 20.

Tabel 4.12
koefesien korelasi dan determinasi Pengaruh X₁ dan X₂ Terhadap Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,465 ^a	,216	,221	2.93570

a. Predictors: (Constant), pengendalian internal , perencanaan anggaran

b. Dependent Variable: akuntabilitas publik

Sumber: Data Diolah (2014)

Dari nilai koefesien korelasi diatas sebesar 0.465 menurut kategory Guilford hubungan perencanaan anggaran dan akuntabilitas public dinilai sedang, pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik sebesar 21.6%. Masih ada 78.4% atau pengaruh variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh X₁ yang tidak diteliti.

Perencanaan anggaran dan pengendalian intern mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas publik, hal ini menandakan ada kecenderungan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian yang lebih baik secara bersamaan mampu mendorong pelaksanaan akuntabilitas secara baik. Pengaruh positif dari perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap implementasi akuntabilitas public, menunjukkan bahwa baiknya perencanaan anggaran dan pengendalian intern merupakan determinan akuntabilitas publik. Pelaksanaan pengendalian internal sebagai pemantau dan penilai dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan merupakan salah satu cara mewujudkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik sebagai tujuan utama dalam meningkatkan *new public management* di pemerintahan dinilai kategori baik, hal tersebut menandakan bahwa akuntabilitas publik di Propinsi Banten belum maksimal dilakukan. Akuntabilitas publik dalam penelitian ini terdapat empat pengukuran akuntabilitas public yaitu

akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas Program dan Akuntabilitas kebijakan yang dijadikan sebagai dimensi akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik pada propinsi Banten secara strategik dapat dicapai melalui perencanaan anggaran dan pengendalian intern yang baik. Prioritas utama yang perlu dilakukan adalah menetapkan akuntabilitas publik sebagai sasaran penting dalam perencanaan anggaran dan pengendalian intern di Propinsi Banten.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik di Propinsi Banten maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Perencanaan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik di Propinsi Banten. Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa perencanaan anggaran yang lebih baik mampu meningkatkan akuntabilitas publik yang lebih baik. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas public sebesar 18.1%, sisanya 81.9% dipengaruhi oleh factor lain selain perencanaan anggaran
2. Pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik di Propinsi Banten. Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa perencanaan anggaran yang lebih baik mampu meningkatkan akuntabilitas publik yang lebih baik. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas public sebesar 17.5%, sisanya 75.5% dipengaruhi oleh faktor lain selain pengendalian intern
3. Perencanaan anggaran dan pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik di Propinsi Banten. Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian intern yang lebih baik mampu meningkatkan akuntabilitas publik yang lebih baik. Pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap

akuntabilitas public sebesar 21.6%, sisanya 78.4% dipengaruhi oleh faktor lain selain pengendalian intern

5.2 Saran

- 5.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dan tertarik dengan judul ini ataupun ada variabel yang mungkin sama, diharapkan untuk lebih mengembangkan variabel perencanaan anggaran, pengendalian intern dan akuntabilitaas publik
- 5.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Propinsi Banten sebagai pedoman peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengendalian intern dan akuntabilitas publik

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Soelendro (2000). Paradigma Baru Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta.
- Budi Mulyana, 2010. Modul Perencanaan Dan Penganggaran Daerah. PPAKD Diklat Akuntansi Keuangan daerah. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenkeu RI. Jakarta
- Imam Ghozali, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indra Bastian, 2006. Audit Sektor Publik Cetakan 3 (2011). Salemba Empat Jakarta
- Indra Bastian, 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta
- International Federation of Accountants, 2001. *Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective International Public Sector Study*. The International Federation of Accountants. New York. ISBN 1-887464-68-9
- Kelly, Janet And Rivenbark, William C. 2003. *Performance Budgeting For State And Local Government*. M.E. Sharpe Armonk, New York.
- Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal, 2004. Standar Profesi Auditor Internal (SPAI). Jakarta
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik –Ed IV.- (2009), ANDI, Yogyakarta

- Muindro Renyowijoyo, 2012. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Sektor Non Laba. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Profil Kemiskinan Di Propinsi Banten Maret 2013. Berita Resmi Statistik (BRS) No. 31/07/36/ Th.VII, 1 Juli 2013
- Rahmadi M, Adi B, Fajar Hasri R, (2006). Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.LPKPAP DEPKEU RI, Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Robinson M. (ed.), 2007, *Performance Budgeting. Linking Funding and Results*,IMF, Washington D.C.
- Robinson Marc and Ducan Last (2009). A Basic Model of Performance Based
- Sekaran, Uma, 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Terjemahan Kwan men Yon. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma and Rouger Bougie (2010). Reseach Methods For Business A Skill Building Approach. John Willey & Sons Ltd. UK
- Sukandarrumidi,. 2006. Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. Gajahmada University Press. Yogyakarta
- Shah Anwar, Cunli Shen, 2007. Citizen-Centric Performance Budgeting at the Local Level. Dalam Anwar Shah (penyunting). *PUBLIC SECTOR GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY SERIES LOCAL BUDGETING.*

Hal 151-178. The International Bank for Reconstruction and Development /
The World Bank. Washington DC

Soekrisno Agoes, 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan
Publik Edisi Ketiga. Jilid II (cetakan Ke 5 2009). Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi UI. Jakarta

Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2011. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta.
Rineka Cipta

The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2004. THE
PROFESSIONAL PRACTICES FRAMEWORK. Florida. ISBN 0-89413-
544-9 04314 04/04

The Institute Of Internal Auditor, 2012. THE INTERNATIONAL STANDARDS
FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING
(STANDARDS).

World Bank (2009). Performance Based Budgeting and Medium Term Expenditure
Frameworks in emerging Europe. The World bank Poland Warsaw Office.
Edition 1 ISBN: 978-83-88911-17-0

[www.bpk.go.id/web/?p=14447, 2/04/2013](http://www.bpk.go.id/web/?p=14447,2/04/2013). Diunduh [30/4/2013]

[www.news.liputan6.com/read/2062309/90-pejabat-banten-diduga-tersangkut-
kasus-korupsi](http://www.news.liputan6.com/read/2062309/90-pejabat-banten-diduga-tersangkut-kasus-korupsi), Diunduh 5/09/2014